



At a Glance

Program SKALA di Tanah Papua

Oktober 2024

Pengantar

Tanah Papua terletak di ujung timur wilayah Indonesia dan terdiri dari enam provinsi: Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, yang dibentuk secara bertahap sejak tahun 1969 hingga 2022 sebagai bagian dari upaya desentralisasi di Indonesia. Tanah Papua terdiri dari Pulau Papua (termasuk Papua Nugini) dan ratusan pulau kecil di sekitarnya, termasuk Biak, Yapen, Misool, Waigeo, Salawati dan Batanta. Secara administratif, dari seluruh enam provinsi di Tanah Papua terdiri dari 42 kabupaten dan kota. Wilayah tersebut memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa dan merupakan rumah bagi beberapa ekosistem terunik di dunia, termasuk hutan hujan yang luas, terumbu karang, dan beragam satwa liar seperti burung Cenderawasih. Wilayah tersebut juga kaya akan budaya, dengan lebih dari 250 kelompok etnis asli, masing-masing memiliki bahasa, tradisi, dan kearifan lokal sendiri. Upaya untuk mengatasi tantangan pembangunan manusia, mengurangi kemiskinan, serta memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan terus dilakukan di wilayah tersebut.

Pemerintah provinsi di Tanah Papua berupaya meningkatkan penyediaan layanan dasar melalui beberapa inisiatif penting. Melalui peningkatan data dan analisis, pemerintah provinsi di Tanah Papua melakukan penyesuaian dengan kebijakan Satu Data Indonesia

untuk memastikan tata kelola dan pemilahan data yang lebih baik guna meningkatkan proses perencanaan penyediaan layanan dasar lintas sektor. Pemerintah provinsi di Tanah Papua juga melaksanakan strategi untuk mengintegrasikan isu-isu terkait inklusi ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga kelompok rentan mendapatkan representasi yang lebih baik. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas fiskal dan pengelolaan keuangan pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Dana OTSUS) serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan fiskal nasional. Selain itu, pemerintah provinsi juga berfokus pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk layanan dasar dan proses perencanaan dan penganggaran berbasis bukti untuk memenuhi persyaratan dari pemerintah pusat.

Program SKALA bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya untuk memperkuat partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan serta dalam penyediaan dan pemanfaatan data. Selain itu, Program SKALA juga mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah dan kualitas belanja publik. Kantor Program SKALA di Provinsi Papua secara resmi mulai beroperasi pada tahun 2022.

Gambar 1. Data Administratif Utama



Jumlah Penduduk:
Papua
1.047.100 jiwa
Papua Selatan
534.410 jiwa
Papua Barat
561.403 jiwa
Papua Barat Daya
591.069 jiwa

(Badan Pusat Statistik, 2022/2023)



Luas Wilayah:
Papua
82.688,37 km²
Papua Selatan
116.858,85 km²
Papua Barat
60.275,33 km²
Papua Barat Daya
38.820,49 km²

(Rancangan Teknokratik RPJMD untuk Papua, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, 2024)



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rp)
Papua
2,74 triliun
Papua Selatan
1,66 triliun
Papua Barat
4,53 triliun
Papua Barat Daya
1,95 triliun

(Pemerintah Provinsi, 2024)













Pusat Administratif:
Papua
Jayapura
Papua Selatan
Merauke

(Undang-undang tentang pembentukan setiap provinsi, 2006 - 2022)

Papua Barat
Manokwari
Papua Barat Daya
Kota Sorong

1. Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia yang bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

Gambar 2. Data Sosioekonomi Utama (Data bersumber dari Badan Pusat Statistik kecuali dinyatakan lain)

Produk Domestik Regional Bruto (Triliun Rupiah):		
	Papua	Papua Barat
	81,74	61,57
	Papua Selatan	Papua Barat Daya
	31,36	36,10
	(2023)	
Tingkat pengangguran		
	Papua	Papua Barat
	5,81	4,31
	Papua Selatan	Papua Barat Daya
	4,75	6,02
	(2024)	
Tingkat kemiskinan		
	Papua	Papua Barat
	26,03%	20,49%
	Papua Selatan	Papua Barat Daya
	26,03%	20,49%
	(2023)	
Penyangang disabilitas dalam % penduduk		
	Papua	Papua Barat
	1,49%	1,53%
	Papua Selatan	Papua Barat Daya
	1,16%	1,50%
	(Regsosek, 2022)	
Koefisien Gini		
	Papua	Papua Barat
	0,362	0,389
	Papua Selatan	Papua Barat Daya
	0,404	0,346
	(2024)	
Indeks Pembangunan Manusia		
	Papua	Papua Barat
	63,01	67,47
	Papua Selatan	Papua Barat Daya
	63,01	67,47
	(2023)	
Tahun bersekolah		
	Papua	Papua Barat
	7,15	7,93
	Papua Selatan	Papua Barat Daya
	7,15	7,93
	(2023)	
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup		
	Papua	Papua Barat
	565	343
	Papua Selatan	Papua Barat Daya
	565	343
	(2020)	
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup		
	Papua	Papua Barat
	38,17	37,06
	Papua Selatan	Papua Barat Daya
	38,17	37,06
	(2020)	
Stunting		
	Papua	Papua Barat
	28,6%	24,8%
	Papua Selatan	Papua Barat Daya
	24,8%	31,0%
	(Survei Kesehatan Indonesia, 2023)	

Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Tanah Papua merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya dengan potensi pertumbuhan yang besar. Sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan, perikanan, dan pertanian menjadi penggerak utama perekonomian. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, terutama di wilayah pedesaan, pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur demi meningkatkan konektivitas dan akses layanan dasar. Pembangunan infrastruktur terbaru, seperti jalan raya, bandar udara, dan pelabuhan laut baru, membuka jalan bagi peluang ekonomi yang lebih baik melalui peningkatan sektor perdagangan dan fasilitasi penyediaan layanan dasar. Pemerintah provinsi di Tanah Papua juga berupaya mengatasi tantangan dalam bidang layanan kesehatan, pendidikan, dan akses air bersih. Upaya pembangunan ini terutama difokuskan pada penduduk asli Papua, yang merupakan mayoritas di wilayah tersebut. Dengan memperbaiki akses pendidikan dan layanan kesehatan, pemerintah bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi, *stunting*, serta kekurangan gizi, sekaligus menciptakan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat setempat.

Melalui dukungan Dana Otonomi Khusus, pemerintah Provinsi di Tanah Papua meningkatkan pengelolaan keuangan publik untuk membangun infrastruktur dan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) guna meningkatkan penyediaan layanan dasar. Inisiatif ini memberikan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan sosial di Tanah Papua.



Layanan Dasar yang Inklusif di Tanah Papua

Program SKALA secara aktif mendukung pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawab utama mereka dalam penyediaan layanan dasar. Di Tanah Papua, pemerintah provinsi berperan penting dalam memfasilitasi keberhasilan pelaksanaan inisiatif dengan dukungan Program SKALA. Pembentukan Komite Program Provinsi (*Provincial Program Committee-PPC*) melalui surat Keputusan Gubernur memungkinkan koordinasi yang lebih baik antar dinas di pemerintah daerah. Sementara itu, Program SKALA menyelaraskan Rencana Kerja Tahunan dengan dokumen perencanaan dan inisiatif daerah. Pendekatan ini memperkuat pencapaian prioritas

Catatan: Berdasarkan publikasi BPS, data di atas dihitung berdasarkan 29 kabupaten/kota, dengan data dari Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah yang digabungkan ke dalam Wilayah Papua sebagai provinsi induk. Pencapaian Provinsi Papua Barat didasarkan pada 13 kabupaten/kota, termasuk data dari Papua Barat Daya di bawah Papua Barat sebagai provinsi induk. Data tersebut merupakan estimasi proksi hasil analisis, karena data terpisah untuk provinsi-provinsi baru belum tersedia dalam publikasi BPS.

pemerintah dan mendorong tata kelola yang kolaboratif berdasarkan pemahaman bersama, kemitraan, dan sinergi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan efektivitas tata kelola daerah.



Mempromosikan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Pemerintah provinsi di Tanah Papua berkomitmen mendukung Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dengan mengintegrasikan prioritas ini ke dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Pemerintah provinsi Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat telah mengintegrasikan perencanaan yang responsif gender ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025–2045 dan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Dengan mengintegrasikan pertimbangan GEDSI ke dalam dokumen perencanaan provinsi, ketiga provinsi ini membuka jalan bagi penganggaran inklusif yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.



Menggunakan Data dan Analitik untuk Perencanaan dan Penyediaan Layanan yang Lebih Baik

Pemanfaatan data dan analitik memiliki peran penting dalam meningkatkan perencanaan dan penyediaan layanan dasar di seluruh Indonesia, khususnya di Tanah Papua. Inisiatif Satu Data Indonesia berupaya menyederhanakan pengelolaan data serta mengintegrasikan sistem baik di tingkat pusat dan daerah. Melalui pelaksanaan Sistem Informasi Desa, Provinsi Papua Barat dan Papua telah meningkatkan kemampuan mereka untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah, sehingga memungkinkan penargetan layanan yang lebih tepat sasaran. Integrasi data Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) Papua ke dalam sistem informasi desa memastikan bahwa kelompok rentan seperti, Orang Asli Papua, perempuan, dan penyandang disabilitas, terwakili dengan lebih baik dalam proses perencanaan.

Selain itu, integrasi sistem melalui sarana seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) semakin memperkuat tata kelola pemerintahan.

Integrasi ini memungkinkan pemerintah provinsi untuk mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan secara lebih efektif. Terkait hal ini, dengan dukungan dari Program SKALA, Sistem Administrasi dan Informasi Kampung Plus (SAIK+) Provinsi Papua Barat telah menerima sertifikasi ISO (International Organization for Standardization), sehingga data yang dikelola dijamin aman dan dapat meningkatkan pemanfaatan informasi dalam penyediaan layanan yang inklusif. Upaya Program SKALA dalam analisis dan pemanfaatan data di Tanah Papua juga telah berkontribusi pada perbaikan proses pengambilan keputusan. Dengan memperluas sistem informasi desa dan menyelarkannya dengan basis data nasional seperti REGSOSEK, pemerintah provinsi dapat mengetahui kebutuhan penduduknya secara lebih akurat, sehingga alokasi sumber daya dapat dilakukan dengan lebih baik dan penyediaan layanan dasar menjadi lebih efisien.



Meningkatkan Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal di Tanah Papua tengah ditingkatkan melalui perbaikan pengelolaan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditetapkan. Di wilayah Papua, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang revisi PMK 76 tahun 2022 yang mengatur pengelolaan dana OTSUS, dan secara aktif menyusun laporan OTSUS tahun 2023 serta memenuhi persyaratan penyaluran untuk tahun 2025. Pemerintah provinsi juga telah meningkatkan kapasitas pengelolaan dana OTSUS sambil berfokus pada penguatan kemampuan mereka untuk menghitung dan merencanakan DAU yang ditetapkan. Selain itu, semua provinsi yang menjadi mitra Program SKALA di Tanah Papua telah mendapatkan manfaat dari pelatihan mengenai penyusunan Rencana Anggaran Pelaksanaan Tahun 2025 dan penggunaan dana OTSUS secara efektif.

Program SKALA juga telah mendukung kegiatan pelatihan kepada lebih dari 150 staf pemerintah daerah di Tanah Papua mengenai perencanaan anggaran, pelaporan dana OTSUS, dan kepatuhan terhadap peraturan pencairan. Bersama dengan inisiatif peningkatan kapasitas dan koordinasi antar otoritas setempat, dukungan Program SKALA tersebut berkontribusi pada peningkatan kapasitas fiskal di seluruh wilayah Papua.



Peningkatan Kualitas Belanja: Perencanaan Standar Pelayanan Minimal

Di Tanah Papua, penerapan SPM ditentukan oleh konteks politik dan sosial ekonomi yang khas di seluruh provinsinya. Fokus utama adalah menyelaraskan RPJPD tingkat provinsi dan kabupaten dengan tujuan nasional, sekaligus mengintegrasikan SPM dan GEDSI. Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) merupakan sarana penting dalam perencanaan berbasis bukti, dan telah memperoleh dukungan regulasi dari Peraturan Gubernur No. 61/2024 untuk meningkatkan pengelolaan data di seluruh desa.

Di Provinsi Papua Barat, upaya dukungan difokuskan pada penyelesaian dokumen RPJPD yang menekankan pada pembangunan yang cerdas, sehat, dan produktif.

Di Provinsi Papua Barat Daya, Program PAITUA (Perlindungan Hari Tua), yang membantu penduduk lanjut usia dalam mengakses dana OTSUS, telah diperluas hingga mencakup 2.276 penerima manfaat. Sementara itu, di Provinsi Papua Selatan, pemerintah provinsi sedang mempersiapkan perencanaan yang responsif gender dan meluncurkan program perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia, yang didanai oleh OTSUS. Dengan dukungan Program SKALA yang berkelanjutan, diharapkan proses perencanaan, penganggaran, dan pemanfaatan data di daerah dapat ditingkatkan, sehingga dapat memperbaiki penyediaan layanan dasar di wilayah Papua secara keseluruhan.

Rencana Kerja Program SKALA Tahun 2024-2025:

TEMA	AREA FOKUS
Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)	<ul style="list-style-type: none">• Mendukung pemerintah provinsi dalam proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif dengan memprioritaskan kelompok rentan.• Memberdayakan masyarakat untuk mengadvokasi kelompok rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran.• Memberikan akses kepada masyarakat terhadap data penting tentang masyarakat adat, kesetaraan gender, disabilitas, dan layanan dasar guna memperkuat upaya advokasi mereka.
Penguatan Penyediaan dan Pemanfaatan Data (D&A)	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Satu Data provinsi di wilayah Papua dengan mendukung Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah dan mengembangkan kapasitas Forum Satu Data untuk mengoordinasikan integrasi data.• Memperluas Sistem Informasi Desa yang terpilah berdasarkan gender, disabilitas, dan OAP (Orang Asli Papua) dengan membantu pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, penganggaran, dan pelatihan kader desa untuk mengumpulkan data.• Mempromosikan pemanfaatan data Regsosek dalam perencanaan dengan melatih Pelatih Utama untuk mendukung analisis mikrodata dan pemanfaatan data regional.
Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Membantu dalam mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi untuk meningkatkan PAD.• Memperkuat tata kelola Dana Otonomi Khusus melalui perbaikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program prioritas.
Peningkatan Kualitas Belanja Daerah (SPM)	<ul style="list-style-type: none">• Memfasilitasi pembaruan data dan integrasi rencana aksi ke dalam rencana tahunan melalui SIPD-RI.• Membantu menghitung biaya kegiatan SPM dan mengidentifikasi sumber daya untuk penyesuaian layanan dasar bagi kelompok rentan.
Tata Kelola Program (PPC)	Dukungan tata kelola Program SKALA di Wilayah Papua